

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR PINJAMAN DANA IMS (STUDI PADA JEMAAT GKII KAMALAPIA)

**Alliny Namilana Rambu Hutar
Dosen Universitas Kristen Wira Wacana Sumba**

**Siti Suryani
Dosen Universitas Kristen Wira Wacana Sumba**

ABTRAKSI

Program pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka untuk mengentaskan masyarakat miskin melalui program penanggulangan kemiskinan. Salah satu yang selalu ada dalam program tersebut adalah adanya dana gulir. Dana yang digulirkan untuk menguatkan modalan bagi usaha masyarakat miskin. Pengalaman membuktikan bahwa dana gulir mengalami banyak kendala, seperti menunggak atau macet. Sehingga dana tidak mungkin lagi bergulir dan dinikmati oleh masyarakat lainnya. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemacetan diakibatkan oleh ketidakmampuan bayar penerima manfaat atau karena adanya kesengajaan untuk tidak membayar. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menghitung rasio hutang dibandingkan dengan pendapatan calon penerima manfaat (HTP), dengan cara membandingkan pengeluaran tetap dengan pendapatan tetapnya. Hasil yang diperoleh rasio HTP sebesar 0,85 atau di bawah rasio 1. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pinjaman dana gulir program IMS diberikan, dipastikan bahwa dana tersebut akan mampu bergulir di warga jemaat tersebut. Warga jemaat memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Program IMS, Kemampuan bayar

ABSTRACT

Community empowerment programs are carried out in order to alleviate the poor through poverty reduction programs. One thing that is always in the program is the existence of a revolving fund. Funds that are rolled out to strengthen capital for the businesses of the poor. Experience has shown that revolving funds experience many obstacles, such as delinquency or traffic jams. So that funds are no longer possible to roll and be enjoyed by other communities. The problem in this research is whether congestion is caused by the beneficiary's inability to pay or whether the congestion is not paying. The analytical tool used is to calculate the ratio of debt compared to income of potential beneficiaries (HTP), by comparing fixed expenses with fixed income. The results obtained by the HTP ratio are 0.85 or below the ratio 1. This shows that if the IMS program revolving fund loan is given, it is certain that the funds will be able to be distributed among the members of the congregation. Congregation members have the ability to repay the loan.

Keywords: Poverty Alleviation, IMS Program, Ability to Pay

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan masyarakat miskin terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama kali Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

dirancang di tahun 1993 sebagai salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan. Sumodiningrat (1995) menyatakan bahwa Program IDT mengandung 3 pengertian dasar, yakni 1) sebagai pemicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, 2) sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan, dan 3) adanya bantuan dana gulir bagi masyarakat yang memerlukan. Cara perguliran dana yang digunakan dalam bentuk kelompok, termasuk sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan, bergantung pada usaha dijalankan, bahkan yang menarik adalah angsuran 1 – 10 digunakan untuk melunasi pokok, angsuran ke 11 untuk membayar biaya yang ditanggung kelompok dan sisanya menambah modal kelompok, angsuran ke 12 untuk tabungan. Priyadi (1997) menyatakan bahwa jika program IDT berhasil maka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa, namun jika gagal akan terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Perjalanan program penanggulangan kemiskinan selalu terlihat adanya dana gulir, meskipun nama programnya berubah. Salah satunya adalah program inisiatif masyarakat setempat (IMS) yang merupakan bentuk dana gulir yang diberikan kepada masyarakat. Dana ini diberikan dalam rangka penguatan modal usaha kepada masyarakat miskin lewat kelompok. Penelitian Basri dan Hermanislamet (2005) melakukan penelitian tentang efektivitas dan output program IMS, ditemukan bahwa ada perbedaan tingkat pencapaian sebelum dan sesudah program IMS sehubungan dengan indikator tingkat pendapatan dan produksi rata-rata usaha masyarakat. Namun efektivitas pelaksanaan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, pengalaman aparat desa, kemampuan aparat desa, kemampuan fasilitator desa, kemampuan PPL. Pemahaman pelaksana, koordinasi antar pelaksana, serta sikap dan tingkat layanan pengurus UPKP. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu program dalam hal ini IMS harus adanya keterlibatan berbagai pihak yang memiliki komitmen untuk menyukseskan program dana gulir. Manfaatnya adalah bahwa akan lembaga-lembaga keuangan informal yang dapat diakses oleh masyarakat miskin dan pengumpulan uang dalam bentuk tabungan, bahkan bunga. Artinya akan ada uang dalam jumlah besar di kelompok jika dikelola dengan baik.

Hal yang terjadi adalah bahwa banyak dana bergulir yang tidak lagi bergulir di masyarakat, mengalami kemacetan yang disebabkan karena anggota tidak mengangsur dan terkadang terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan oleh pengurus. Dana gulir banyak disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang penyalurannya lewat desa, badan keswadayaan masyarakat dan sebagainya. Namun ujungnya dana ini seperti terdiam dan seakan menghilang.

Terobosan yang dibuat oleh Bappeda kabupaten Sumba Timur tepatnya bidang ekonomi dan SDA dalam memfasilitasi penyaluran dana penguatan modal usaha dalam Program IMS (Inisiatif Masyarakat Setempat), melalui kelompok-kelompok yang bernaung di bawah lembaga keagamaan, seperti masjid, gereja, dan lainnya. Mungkin terbesit pertanyaan, kenapa dana IMS masuk lewat lembaga keagamaan? Bukan hanya kali ini saja dana pemberdayaan yang berupa dana gulir diberikan untuk masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha. Namun fenomena kemacetan selalu saja menjadi masalah sehingga dana yang diharapkan terus bergulir dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan tidak dapat terwujud. Harapan pemerintah atas dana IMS, apabila dana gulir dikelola oleh lembaga keagamaan akan lebih baik daripada yang dikelola di luar lembaga agama. Dana gulir dalam kenyataannya tidak lagi bisa digulirkan dengan berbagai alasan, seperti masyarakat mampu mengembalikan atau ada yang tidak mau mengembalikan dengan alasan dana untuk “orang miskin”. Meskipun ada juga yang bermasalah di pengelola yang kurang memiliki komitmen untuk mengelola dana secara sungguh-sungguh demi kemaslahatan banyak orang. Namun benarkah demikian? Apakah benar masyarakat tidak mampu mengembalikan pinjamannya, atau masyarakat secara sengaja tidak mau

mengembalikan? Ini dua hal yang berbeda. Jika masyarakat dianggap tidak bisa mengembalikan seharusnya bukan dana gulir yang diberikan tetapi dana hibah (sosial).

Penyaluran dana IMS pernah dievaluasi tahun 2013 setelah beberapa tahun berjalan di Kabupaten Sumba Timur. Hasilnya bahwa dana mampu dikelola dengan baik oleh kelompok yang bernaung melalui rumah ibadah. Sehingga program ini masih berjalan sampai saat ini. GKII di Kamalapia menjadi salah satu target untuk menjadi penerima manfaat dana IMS pada tahun 2018. Kondisi masyarakat atau jemaat dari gereja GKII kampung Kamalapia desa Kotak Kawau adalah orang miskin, ini menimbulkan satu ketakutan bagi penanggung jawab kelompok yang tidak lain adalah gembala sidang atau Pendeta. Desa Kotak Kawau juga pernah menerima program dana gulir yang bernama Anggur Merah (disingkat) program dari propinsi Nusa Tenggara Timur, namun kemacetan terjadi sehingga dana tersebut tidak lagi bergulir. Maka wajar jika adanya perenungan, “Apakah bisa warga jemaat yang tergabung dalam kelompok penerima manfaat dapat mengangsur pinjamannya?” Disatu sisi gereja ingin membantu warga jemaatnya mendapatkan sumber dana untuk menambah modal usaha tanaman hortikultura yang saat itu sedang dikembangkan dan dalam pendampingan. Untuk menjawab semuanya, akhirnya gereja meminta Bappeda untuk datang dan mensosialisasikan Program IMS kepada warga jemaatnya dan memberikan pelatihan pada pengurusnya. Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan kelompok dalam gereja ini direncanakan akan menerima dana IMS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Daftar penerima manfaat tercatat 20 orang dan jumlah tersebut adalah jumlah seluruh keluarga yang ada di Kamalapia. Setiap orang memperoleh dana gulir Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan dan bunga sebesar 1 persen, dimana bunga tersebut digunakan untuk membantu kelompok ini untuk menambah modal kelompok, operasional pengurus, dukungan kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing 25 persen. Akhirnya gereja menerima dengan membuat kesepakatan dengan kelompok penerima untuk memegang kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Bappeda kabupaten Sumba Timur.

Keberhasilan anggota kelompok dalam mengangsur pinjaman erat kaitannya dengan kemampuan membayar anggota, sehingga besaran jumlah yang diberikan kepada anggota kelompok. Jadi setiap bulan anggota dapat menyisihkan uangnya untuk mengangsur pinjamannya. Jika anggota memperoleh pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), apakah bisa mengangsurnya setiap bulan? Itu juga yang dipertimbangkan. Sehingga sangat perlu mengetahui kemampuan membayar anggota kelompok sebelum menerima dana gulir melalui program IMS tersebut.

Masalah Penelitian

Pengalaman kemacetan atas dana gulir yang banyak terjadi, membuat gereja ragu untuk menerima program penguatan modal usaha yang bersumber dari dana IMS. Keraguan tersebut dikarenakan adanya pengalaman dana gulir yang banyak mengalami kemacetan, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai alasan, seperti dana tersebut adalah untuk orang miskin, sehingga mereka tidak mau membayar pinjamannya, atau bisa juga anggota kelompok tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Pertanyaan Penelitian

Mendasar pada pemasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah , “Seberapa besarkah kemampuan membayar pinjaman jemaat GKII jika dana IMS tersebut disalurkan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman jemaat GKII jika dana IMS di salurkan.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan informasi bagi gereja untuk mengambil keputusan menerima atau menolak dana IMS bagi jemaat GKII Kamalapia.
2. Penelitian ini memberikan informasi bagi pemerintah dalam memberikan dana gulir ke masyarakat, baik jumlah ataupun jangka waktu sehingga target pengembalian sebagai salah satu tolak ukur pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kemampuan Membayar

Capacity to Pay atau kemampuan mengembalikan pinjaman adalah indikator penting dalam penilaian kredit calon debitur. Oleh karena itu kelengkapan berkas pengajuan kredit, survei, *interview* dan tetek bengek proses perkreditan lainnya ujung-ujungnya adalah untuk memastikan calon debitur mampu membayar kembali angsuran plus bunga pinjaman setelah kredit dicairkan.

Kemampuan Membayar adalah *ability to pay* yaitu kemampuan debitur untuk membayar utang pokok beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan dan/atau keuntungan. Menurut Sutoyo (1997), kemampuan calon debitur mencicil kredit yang dipinjam, dapat diukur dengan jalan membandingkan jumlah penghasilan tetap mereka dengan kewajiban keuangan tiap bulan. Secara singkat, perbandingan tadi dapat dihitung dengan mempergunakan rasio utang berbanding pendapatan (HTP) atau debt to income ratio. Adapun rumus utang berbanding pendapatan (HTP) adalah sebagai berikut:

$$\text{HTP} = \frac{\text{Pengeluaran Tetap}}{\text{Pendapatan Tetap}}$$

Pengeluaran tetap tiap bulan adalah biaya rumah tangga (termasuk sewa rumah, uang sekolah, biaya kesehatan, premi asuransi dan sebagainya), cicilan pinjaman yang sudah ada, serta cicilan kredit baru yang akan diberikan bank. Sedangkan pendapatan tetap berupa omset rata-rata tiap bulan, gaji atau upah yang diterima setiap bulan, dikurangi pajak pendapatan.

Sebagai pedoman umum dapat diutarakan bahwa pendapatan tetap bulanan harus lebih besar dari pengeluaran tetap bulanan, paling sedikit satu setengah kali lebih besar. Memutuskan plafond kredit atau pinjaman calon debitur salah satu pertimbangan yang dipergunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit / pinjaman calon nasabah menggunakan analisa IDIR (*Installment to Disposable Income Ratio*) yang merupakan pengembangan dari rasio utang berbanding pendapatan (HTP) atau *Debt to Income Ratio*.

Angka kredit bemasalah yang tinggi tidak hanya akan merugikan pihak bank, tetapi juga menimbulkan kerugian para pemilik dana yang sebagian besar merupakan anggota masyarakat. Kasmir (2000) mengungkapkan kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh

dua faktor, yaitu: 1. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet. 2. Adanya ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkenamusiabah.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kuantitatif, dimana data yang disajikan berupa angka-angka dengan tujuan penelitian deskriptif dimana penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi.

b. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi calon penerima manfaat Dana IMS sebanyak 20 orang yang direncanakan akan menerima pinjaman untuk menambah modal usaha.

c. Jenis dan Sumber Data serta Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Pada saat pengisian kuesioner peneliti mendampingi untuk menjelaskan maksud dari setiap pertanyaan yang ada, sehingga responden dapat mengerti.

d. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan rumus perbandingan utang dan pendapatan (HTP). Nilai rasio HTP diperoleh dari perbandingan pengeluaran tetap dan pendapatan tetap.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di salah satu gereja yang akan di sasar oleh Bappeda Kabupaten Sumba Timur sebagai penerima dana IMS, Yakni Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di RT 10 Kampung Kamalapia, Desa Kotak Kawaii kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur.

Temuan, Analisis dan Pembahasan

a. Gambaran Objek Penelitian

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Kamalapia merupakan sebuah gereja yang dibangun tahun 2014 yang masih berstatus Pos Pekabaran Injil (PI). Jemaat berjumlah 20 kepala keluarga, atau sekitar 85 jiwa. Secara umum masyarakat kampung Kamalapia bekerja sebagai gembala hewan milik orang, yakni sapi. Sistem pembagian yang diperoleh gembala adalah jika hewan beranak 10 ekor maka 7 ekor anak sapi milik pemilik hewan dan 3 ekor milik gembala. Rata-rata hewan yang digembalakan berkisar 20 sampai dengan 40 ekor sapi per gembala. Sehingga dapat dipastikan setiap tahun selalu gembala memperoleh anak sapi. Namun ternyata tidak demikian, karena ijon hewan telah membelenggu para gembala, demi memenuhi kebutuhan hidup. Terobosan yang dilakukan oleh gereja adalah mengajak warga jemaatnya untuk berkebun hortikultura, dengan mendampingi dari hulu sampai hilir. Gereja mengalang kemitraan baik dengan pemerintah, LSM maupun perguruan tinggi. Hasilnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum dengan tidak harus menjual anak sapihnya sewaktu masih diperut. Kecuali jika ada berbagai urusan yang besar seperti kematian maupun pernikahan.

b. Temuan

Berdasarkan kebutuhan data yang terkait dengan penelitian adalah beberapa karakteristik untuk menggambarkan keadaan responden, baik dari umur, jenis kelamin, jenis usaha, pendidikan, dan tanggungan keluarga jemaat GKII di Kamalapia.

a. Karakteristik Responden Umur

Tabel 1. Umur Responden

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase
20 – 30	3	15
31 – 40	7	35
41 – 50	3	15
>50	7	35
Total	20	100

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden yang disasar sebagai penerima memiliki umur paling rendah 20 tahun, sebanyak 3 orang. Sementara umur lebih dari 50 tahun ada sebanyak 7 orang. Dalam kenyataannya warga jemaat yang disasar adalah usia produktif, artinya responden masih dapat bekerja.

b. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin

Tabel 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
Laki-laki	14	70
Perempuan	6	30
Total	20	100

Sumber: data diolah

Tabel 2 Menunjukkan jumlah responden yang disasar adalah laki-laki sebanyak 14 orang atau 70 persen dari total responden. Ini menjelaskan bahwa pencari nafkah dilakukan oleh laki-laki, hal ini ditandai dengan adanya 70 persen responden adalah laki-laki.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha

Tabel 3 Usaha Responden

Usaha Yang DiJalankan	Jumlah (Orang)	Persentase
Petani Sayuran	15	75
Penjual Sayuran	1	5
Pengrajin Tenun	1	5
Kios	1	5
Penjual Kayu Bakar	2	10
Total	20	100

Sumber: Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa usaha sayuran atau hortikultura menunjukkan yang digeluti oleh responden, sebanyak 15 orang atau 75 persen dari total respon adalah usaha sayuran (bertanam sayur). Hal ini menunjukkan bahwa pilihan usaha yang diakui sebagai penopang sehari-hari adalah sebagai petani sayuran.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4 Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
Tidak Sekolah	1	5
SD	17	85
SMP	1	5
SMA	0	0
Sarjana	0	0
Pasca Sarjana	1	5
Total	20	100

Sumber: Data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat di RT 10 Kampung Kamalapia 85 persennya berpendidikan SD atau tidak lulus SD (pernah duduk di SD). Hal ini wajar ketika ada perubahan sumber pendapatan untuk menopang kebutuhan sehari-hari harus ada bimbingan yang dilakukan oleh gereja.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga

Tabel 5 Tanggungan Keluarga Responden

Tanggungan Keluarga	Jumlah (Orang)	Persentase
Tidak ada	2	10
1 – 3	10	50
4 – 6	6	30
>6	2	10
Total	20	100

Sumber: Data diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga bagi responden yakni sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan di keluarga rata-rata 3 orang atau sebesar 50 persen dari masyarakat memiliki tanggungan 3 orang. Meskipun ada juga yang memiliki tanggungan lebih, namun terbagi dalam persentase 10 sampai dengan 30 persen. .

c. Analisis dan Pembahasan

Setelah dilakukan pembagian kuesioner pada 20 responden yang tidak lain adalah seluruh populasi, sehingga tidak ada yang mewakili baik dari sumber pendapatan dan pengeluaran keluarga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga

No	Responden (inisial)	Pendapatan Keluarga	Pengeluaran Keluarga	Sisa	HTP
1	JW	3.175.000	3.083.333	91.667	0.97
2	HP	979.167	662.500	316.667	0.68
3	KKN	350.000	95.833	254.167	0.27
4	SMK	741.667	633.333	108.333	0.85
5	SHH	1.266.667	1.150.000	116.667	0.91
6	MKG	616.667	483.333	133.333	0.78
7	AHB	1.600.000	975.000	625.000	0.61
8	NJ	800.000	729.167	70.833	0.91
9	MKK	2.750.000	2.650.000	100.000	0.96
10	BK	1.941.667	1.787.500	154.167	0.92
11	DDL	2.350.000	1.841.667	508.333	0.78
12	RNM	2.333.333	2.116.667	216.667	0.91
13	MK	3.050.000	2.991.667	58.333	0.98
14	YD	1.525.000	1.479.167	45.833	0.97
15	PN	1.241.667	1.200.000	41.667	0.97
16	NK	1.158.833	1.150.000	8.333	0.99
17	DNK	1.566.667	1.266.667	300.000	0.81
18	DW	1.158.333	1.089.167	69.167	0.94
19	KL	1.325.000	1.308.333	16.667	0.99
20	AKB	1.991.667	1.766.667	225.000	0.89
	Jumlah	31.920.833	28.460.000	3.460.833	17.097
	Rata-rata	1.596.042	1.423.000	173.041,67	0.85

Sumber: data diolah

Berdasarkan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa rasio utang berbanding pendapatan (HTP) atau *Debt to Income Ratio* sebesar 0.85, rasio ini kurang dari 1. Ini menunjukkan bahwa calon peminjam dana IMS memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman jika dana IMS diberikan kepada kedua puluh responden yang tertera dalam tabel 4.6. Pendapatan responden tergolong kecil karena di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP) yakni sebesar Rp 1.596.042,- namun pengeluaran masyarakat dalam bentuk uang/kas berada dibawah pendapatannya yakni sebesar Rp 1.423.000,- sehingga meskipun responden memiliki pendapatan yang rendah, tetapi akan mampu membayar pinjaman dana IMS. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran responden lebih rendah daripada pendapatannya. Namun dari nilai perorangan yang ada jumlah yang diberikan akan berbeda-beda menurut kemampuan bayar pinjaman. Jika ini dilakukan secara benar, maka tidak akan terjadi kemacetan, diakibatkan ketidakmampuan bayar warga jemaat. Namun ada alasan yang lain yakni tidak mau membayar.

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, dalam memutuskan pinjaman bagi calon debitur selalu menggunakan rasio utang berbanding pendapatan (HTP) yang paling sederhana, untuk melihat kemampuan bayar atas pinjaman yang diberikan. Bank menggunakan analisa IDIR (*Installment to Disposable Income Ratio*) yang merupakan pengembangan dari HTP. Gereja sebagai lembaga yang dipercaya untuk membina lembaga

keuangan mikro semi formal harus tetap mengacu pada cara-cara lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal itu diperlukan supaya dana gulir program IMS dapat dikelola secara baik dan lancar. Jika lancar maka bukan saja dapat bergulir hanya sekali bahkan berkali-kali bahkan terjadi peningkatan jumlah pinjamannya dan jumlah orang yang meminjam bertambah banyak. Sementara bunga yang ada dapat dikembangkan untuk menambah modal kelompok, operasional pengurus termasuk pengadaan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan kelompok, sumbangan buat pendidikan dan kesehatan anggota kelompok.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa rasio utang berbanding pendapatan (HTP) Jemaat GKII Kamalapia sebesar 0,85 atau kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa warga jemaat memiliki kemampuan membayar pinjaman jika Dana IMS diberikan.

b. Saran

Jemaat GKII di Kamalapia memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dana IMS jika Bappeda Kabupaten Sumba Timur akan memberikan alokasi pada gereja tersebut dalam rangka memberikan penguatan modal usaha masyarakat. Namun kemampuan warga jemaatnya berbeda-beda, sehingga beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:

1. Jumlah nilai pinjaman tidak harus disamakan, tetapi berdasarkan kemampuan bayarnya. Ini untuk menghindari kebiasaan dimana dana-dana gulir selalu diberikan dalam jumlah yang sama, sehingga ketika masa pembayaran pinjaman terjadi tunggakan bahkan kemacetan.
2. Jangka waktu pinjaman tidak harus disamakan tetapi lebih fleksibel disesuaikan dengan kemampuan membayar warga jemaat/masyarakat.
3. Selalu diingatkan tanggal bayar untuk mengantisipasi sifat lupa membayar angsuran pinjaman, pada saat pertemuan bulanan atau pada akhir ibadah di gereja. Paling tidak 1 minggu sebelum jatuh tempo pembayaran sudah diinformasikan.
4. Pinjaman kedua dapat diberikan apabila selama mengangsur pinjaman pertama tidak menunggak ataupun macet. Sehingga warga jemaat menjadi taat bayar atau melakukan pembayaran tepat waktu atau paling tidak setiap bulan selalu mengangsur meskipun lebih dari tanggal jatuh tempo tetapi tidak lewat bulan.
5. Pihak Bappeda memberikan pelatihan dan pendampingan dalam administrasi ataupun tata kelola dana IMS, karena melihat pendidikan yang dimiliki oleh warga jemaat di Kamalapia 85 persen SD (lulus SD dan tidak lulus SD).
6. Pengelolaan dana sebisa mungkin tetap ada di gereja dalam arti pimpinan gereja sebagai ketua kelompok sekaligus penanggung jawab atas perguliran dana IMS secara berkelanjutan demi peningkatan ekonomi warga jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, hasan dan Bondan Hermanislamet. 2005. Efektifitas Pelaksanaan Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) ulawesi Agriculture Area Project di Kabupaten Kendari. Magister Perencanaan Kota dan Daerah. UGM. *Tesis*
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

-
- Priyadi, Unggul. 1997. Pelaksanaan Program Desa tertinggal Dalam Perspektif Pembangunan Perdesaan. *JEP* Volume 2. No. 3 ISSN: 1410-2641.
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metode Research* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Sutoyo, Siswanto. 1997. *Analisa Kredit Bank Umum* Jakarta: PTBustaka Banaman Pressindo
- Sumodiningrat, Gunawan. 1995. Program Inpres Desa Tertinggal: Kebijakan dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan. *Seminar* Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Dulu, Kini dan Masa Depan. Bappenas.
- Widyartati, Penta. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir Di BKM Sendang Mukti, Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang* Vol. 8 No. 3. Edisi Oktober 2016.